

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP), KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMITMEN PIMPINAN

Angger Wisnu Widiyanto¹, Cris Kuntadi², R. Luki Karunia³

¹ Mahasiswa Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, email: angger.2443021050@stialan.ac.id

² Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

³ Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta, Email: luki@stialan.ac.id

Corresponding author: Angger Wisnu Widiyanto¹

| Received: 15-10-2024

| Revised: 16-10-2024

|| Accepted: 17-10-2024

Abstract:

Efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya keuangan secara optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Konsep ini menekankan pentingnya meminimalkan pemborosan dan memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan memberikan hasil yang maksimal. Dalam praktiknya, efisiensi mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan anggaran yang cermat, pelaksanaan program yang tepat, hingga pengawasan yang ketat untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi inefisiensi. Dengan menerapkan prinsip efisiensi, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat pencapaian target pembangunan, dan pada saat yang sama, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik. Artikel ini mereview faktor-faktor yang memengaruhi Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP), Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan, suatu studi literatur manajemen keuangan negara. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) berpengaruh terhadap Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran; 2) Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran; dan 3) Komitmen Pimpinan berpengaruh terhadap Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran.

Keywords: Efisiensi pengelolaan anggaran, Standar Operasional Prosedur (SOP), Kualitas SDM, dan Komitmen pimpinan.



Introduction

Pengelolaan anggaran yang efisien merupakan salah satu tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan efisiensi, masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diatasi. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020, terdapat 7.868 temuan yang memuat 12.632 permasalahan, meliputi 6.132 (48,54%) kelemahan sistem pengendalian intern dan 6.500 (51,46%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp11,20 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat inefisiensi yang signifikan dalam pengelolaan anggaran negara.

Salah satu masalah utama adalah rendahnya penyerapan anggaran, terutama di awal tahun fiskal. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada triwulan I tahun 2021, realisasi belanja negara baru mencapai 12,6% dari pagu anggaran. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran, yang dapat berdampak pada pelaksanaan program-program pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

Korupsi masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran di Indonesia. Menurut Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2020 berada di peringkat 102 dari 180 negara dengan skor 37/100. Meskipun terjadi peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, skor ini masih jauh dari ideal dan menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi hambatan signifikan dalam mencapai efisiensi pengelolaan anggaran.

Ketidakesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaporkan bahwa pada tahun 2020, terdapat 30% program pemerintah yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan strategis dan implementasi anggaran, yang dapat mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran masih menjadi isu yang perlu ditangani. Berdasarkan Open Budget Survey 2019, Indonesia memperoleh skor 70/100 untuk transparansi anggaran, yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal keterbukaan informasi anggaran kepada publik. Kurangnya transparansi ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dan berpotensi mengurangi efisiensi penggunaan dana publik.

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah ketidakmerataan alokasi anggaran antar daerah. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, 82,3% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ketimpangan ini dapat mengakibatkan inefisiensi dalam distribusi sumber daya dan menghambat pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, menjadi jelas bahwa peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran di Indonesia masih memerlukan perhatian serius dan upaya yang berkelanjutan. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematis untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, mulai dari perbaikan sistem perencanaan dan pengendalian anggaran, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, hingga penguatan upaya pemberantasan korupsi. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mencapai tingkat efisiensi pengelolaan anggaran yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Banyak penelitian sebelumnya yang telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran. Namun, belum ada yang melakukan penulisan *Literature Review* untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antar variabel eksogen (X_1) Standar Operasional Prosedur, (X_2) Kualitas Sumber Daya Manusia, (X_3) Komitmen Pimpinan terhadap variabel endogen (Y) Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran. Artikel ini memberikan

ringkasan dan analisis sistematis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan telah dipublikasikan, tentang faktor Standar Operasional Prosedur, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Komitmen Pimpinan yang mempengaruhi Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran.

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah Standar Operasional Prosedur (SOP) berpengaruh terhadap Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran?
2. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran?
3. Apakah Komitmen Pimpinan berpengaruh terhadap Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran?

Literature Review

Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran menjadi krusial bagi keberhasilan organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Efisiensi, dalam konteks ini, didefinisikan oleh Mardiasmo (2018) bukan hanya sebagai minimisasi pengeluaran, melainkan optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai output maksimal. Dengan kata lain, efisiensi anggaran berarti mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin. Hal ini menuntut perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang terkendali, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan meminimalisir potensi pemborosan atau inefisiensi.

Perencanaan anggaran yang efektif, menurut Halim (2016), harus berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Artinya, alokasi anggaran harus terkait langsung dengan indikator kinerja yang terukur dan spesifik. Pendekatan ini memungkinkan monitoring dan evaluasi yang lebih objektif terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu, perencanaan juga perlu mempertimbangkan analisis risiko dan skenario alternatif untuk mengantisipasi perubahan dan ketidakpastian. Dengan demikian, anggaran dapat dialokasikan secara tepat sasaran dan memberikan dampak optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pengawasan yang ketat dan berkelanjutan juga berperan vital dalam menjaga efisiensi pengelolaan anggaran. Rahayu (2017) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan anggaran. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi dalam pengawasan, sementara akuntabilitas memastikan setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Mekanisme pengawasan yang efektif, seperti audit internal dan eksternal, serta sistem pelaporan yang terstruktur, dapat membantu mencegah penyimpangan dan memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukannya.

Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan anggaran menjadi kunci untuk pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Sujarweni (2015) menyatakan bahwa evaluasi bukan hanya mengukur capaian kinerja, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan anggaran di periode berikutnya. Siklus perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang berkesinambungan inilah yang akan mendorong peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran secara berkelanjutan.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menurut Moekijat (2008), Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu pedoman yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan dengan cara yang tepat dan efektif. SOP merupakan suatu dokumen yang berisi tentang prosedur dan instruksi yang harus diikuti oleh semua orang yang terlibat dalam suatu kegiatan atau pekerjaan.

SOP memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, meningkatkan kualitas hasil kerja, mengurangi kesalahan dan kecelakaan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan.

(Wijayanti, 2013). Dengan demikian, SOP dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Sutabri (2012), SOP terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Tujuan: menjelaskan apa yang ingin dicapai dengan SOP tersebut.
2. Ruang lingkup: menjelaskan batasan dan cakupan SOP tersebut.
3. Definisi: menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam SOP tersebut.
4. Prosedur: menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk melaksanakan SOP tersebut.
5. Tanggung jawab: menjelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan SOP tersebut.

Dalam membuat SOP, perlu dilakukan beberapa tahap, yaitu:

1. Identifikasi kebutuhan: menentukan apa yang dibutuhkan untuk membuat SOP tersebut.
2. Pengumpulan data: mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk membuat SOP tersebut.
3. Perancangan: membuat rancangan SOP tersebut.
4. Pengujian: menguji SOP tersebut untuk memastikan bahwa SOP tersebut efektif dan efisien.
5. Implementasi: melaksanakan SOP tersebut dalam kegiatan sehari-hari (Wijayanti, 2013).

Dengan demikian, SOP dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, SOP perlu dibuat dan diimplementasikan dengan baik dalam suatu organisasi.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan suatu organisasi. Menurut Hasibuan (2016), kualitas SDM dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Kualitas SDM yang tinggi akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas, inovasi, dan daya saing organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Lebih lanjut, menurut Rivai dan Sagala (2015), kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh pendidikan dan pelatihan yang diterima, tetapi juga oleh sikap, motivasi, dan pengalaman kerja individu. Pendidikan formal memberikan dasar pengetahuan, sementara pelatihan dan pengalaman kerja akan meningkatkan keterampilan praktis. Selain itu, sikap positif dan motivasi yang tinggi akan mendorong individu untuk bekerja lebih baik dan berkontribusi secara maksimal terhadap tujuan organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan sikap dan motivasi karyawan.

Selain itu, kualitas SDM juga dipengaruhi oleh budaya organisasi yang mendukung kolaborasi dan inovasi. Menurut Rivai dan Mulyadi (2012) dalam bukunya "Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi", budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Pimpinan yang menciptakan lingkungan kerja yang kondusif akan mendorong SDM untuk berinovasi dalam pengelolaan anggaran, mencari cara-cara baru untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi pemborosan. Dengan demikian, kualitas SDM yang baik, didukung oleh budaya organisasi yang positif, akan berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran. Secara keseluruhan, kualitas SDM adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu fokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan demikian, organisasi akan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta bersaing secara efektif di era globalisasi.

Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Menurut Sutrisno (2016), komitmen pimpinan dapat diartikan sebagai kesediaan dan ketulusan pimpinan untuk berkontribusi terhadap tujuan organisasi serta mendukung pengembangan sumber daya manusia. Pimpinan yang memiliki komitmen tinggi akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi.

Lebih lanjut, menurut Rivai dan Sagala (2015), komitmen pimpinan tidak hanya terlihat dari tindakan dan keputusan yang diambil, tetapi juga dari sikap dan perilaku sehari-hari. Pimpinan yang menunjukkan komitmen melalui komunikasi yang terbuka, dukungan terhadap pengembangan karyawan, serta keterlibatan dalam kegiatan organisasi akan meningkatkan rasa percaya dan loyalitas karyawan. Hal ini sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh Bass (1990), di mana pemimpin yang transformasional mampu menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks organisasi, komitmen pimpinan juga berhubungan erat dengan budaya organisasi. Menurut Mangkunegara (2015), budaya organisasi yang kuat dapat dibangun melalui komitmen pimpinan yang konsisten. Pimpinan yang berkomitmen akan menciptakan nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung tujuan organisasi, sehingga karyawan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan budaya tersebut. Dengan demikian, komitmen pimpinan menjadi salah satu faktor penentu dalam menciptakan budaya organisasi yang sehat dan produktif.

Secara keseluruhan, komitmen pimpinan merupakan elemen kunci dalam mencapai keberhasilan organisasi. Pimpinan yang berkomitmen tidak hanya akan meningkatkan kinerja individu, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung pengembangan SDM. Dengan demikian, organisasi perlu fokus pada pengembangan komitmen pimpinan sebagai bagian dari strategi manajemen yang lebih luas.

Table 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Fina Arpah (2016)	Strategi Peningkatan Akuntabilitas Keuangan di Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Sumber Daya Manusia, Standar Operasional Prosedur, dan Komitmen Pimpinan berpengaruh terhadap Peningkatan Akuntabilitas Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas
2	Durratun Nashihah (2023)	Strategi Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Malang	Sumber Daya Manusia, Standar Operasional Prosedur, dan Komitmen Pimpinan berpengaruh terhadap Peningkatan	Peningkatan Akuntabilitas

			Akuntabilitas Keuangan	
3	Muhammad Syauqi (2017)	Strategi Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor dalam Pengelolaan APBD	Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran	-
4	Erwinton Putra Antonius Tarigan (2013)	Standar Akuntansi Pemerintah dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Komitmen Pimpinan berpengaruh terhadap Akuntabilitas	Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas
5	Pancawati Hardiningsih (2020)	Does Competency, Commitment, and Internal Control Influence Accountability?	Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan berpengaruh terhadap Akuntabilitas	Pengaruh terhadap Akuntabilitas
6	Cris Kuntadi (2022)	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian/Lembaga : Sistem Pengukuran Kinerja, Dukungan Organisasi, dan Faktor Individual	Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan berpengaruh terhadap Pelaksanaan Anggaran	Pengaruh terhadap Pelaksanaan Anggaran

Method

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

Results and Discussion

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review* ini adalah:

Pengaruh Standar Operasional Prosedur terhadap Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran

(Fina Arpah, 2016) Pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian sangat signifikan. Meskipun terdapat 12 SOP yang telah disusun, hanya satu yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sementara 11 lainnya belum sepenuhnya mematuhi regulasi. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana dan ketidakdisiplinan dalam administrasi keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa pengelola keuangan sering melakukan improvisasi berdasarkan pengalaman, yang berpotensi menurunkan akuntabilitas dan efisiensi. Oleh karena itu, evaluasi dan pembaruan SOP secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa semua pengelola keuangan memahami dan mematuhi SOP yang ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan mendukung akuntabilitas yang lebih baik.

Pendapat tersebut dikuatkan oleh (Durratun Nashihah, 2023) dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Malang. Meskipun terdapat peningkatan akuntabilitas kinerja, masih ada tantangan dalam implementasi SOP yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran. Penguatan SOP dalam pelayanan publik, survei kepuasan masyarakat, dan peningkatan koordinasi antar perangkat daerah diusulkan sebagai strategi untuk memperbaiki kinerja. Dengan memperkuat SOP dan melibatkan masyarakat, diharapkan pengelolaan anggaran dapat lebih efisien dan akuntabel, sehingga mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Pada variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (Fina Arpah, 2016) variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun SDM tidak sepenuhnya mematuhi standar operasional prosedur (SOP), terdapat indikator positif yang mencerminkan kemampuan dan inisiatif mereka dalam mengatasi masalah. Namun, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan menjadi hambatan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada problem solving sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Begitu juga dengan (Durratun Nashihah, 2023) kualitas sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Malang. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam akuntabilitas kinerja, masih ada tantangan terkait rendahnya pendidikan dan pemahaman SDM terhadap regulasi pengelolaan keuangan. Hal ini mengakibatkan ketidakefektifan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan penguatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM diharapkan dapat meminimalisir inefisiensi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Selanjutnya menurut (Muhammad Syauqi, 2017) kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Bogor. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran. Keterbatasan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di dinas pendapatan daerah menghambat optimalisasi penerimaan anggaran, sementara pemahaman anggota DPRD mengenai pengelolaan keuangan juga berperan penting dalam pengawasan anggaran. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM dan komunikasi antar instansi menjadi kunci untuk mencapai efisiensi

dalam pengelolaan anggaran daerah, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Setelah itu menurut (Pancawati Hardiningsih, 2020) kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan anggaran, terutama dalam konteks pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan komitmen aparat desa, serta sistem pengendalian internal yang baik, berkontribusi positif terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran. SDM yang berkualitas mampu memahami dan menerapkan regulasi dengan baik, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Selain itu, tingkat pendidikan yang memadai memperkuat pengaruh positif dari kompetensi SDM terhadap akuntabilitas, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan menjadi kunci untuk mencapai pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan efektif.

Diakhir (Cris Kuntadi, 2022) kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh besar terhadap efisiensi pengelolaan anggaran di Kementerian/Lembaga. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan individu, termasuk pengetahuan teknis dan motivasi, sangat menentukan dalam pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien. SDM yang berkualitas mampu memahami dan menerapkan sistem pengukuran kinerja, serta beradaptasi dengan regulasi yang ada, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran. Dukungan organisasi dan komitmen manajemen juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pengembangan SDM. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan yang tepat menjadi kunci untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Pada variabel Komitmen Pimpinan (Fina Arpah, 2016) variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa manajemen yang tidak sepenuhnya melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Permenkeu Nomor 162/PMK.05/2013, berkontribusi pada rendahnya akuntabilitas keuangan. Pimpinan yang berkomitmen untuk menerapkan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten dapat meningkatkan kapasitas problem solving dan disiplin dalam administrasi keuangan. Hal ini akan mendorong pengelola anggaran untuk mematuhi SOP, sehingga mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan demikian, komitmen pimpinan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Begitu juga dengan (Durratun Nashihah, 2023) komitmen pimpinan berperan krusial dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Malang. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan komitmen dari pimpinan, terutama Walikota dan kepala Perangkat Daerah, menjadi langkah awal yang penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan adanya komitmen yang kuat, penganggaran berbasis kinerja dapat diterapkan secara efektif, yang mengurangi potensi inefisiensi dan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan terhubung dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga menjadi bagian dari strategi yang didorong oleh pimpinan untuk memastikan pelaksanaan SAKIP yang optimal. Dengan demikian, komitmen pimpinan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan efektif.

Selanjutnya menurut (Erwinton Putra Antonius Tarigan, 2013) komitmen pimpinan daerah, seperti Walikota Yogyakarta, memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran melalui penerapan akuntansi berbasis akrual. Komitmen ini diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang belum memadai. Dengan dukungan pimpinan, kebijakan yang tepat dapat diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan, yang pada gilirannya meminimalkan kebocoran

dana dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Selain itu, komitmen pimpinan juga mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan sistem aplikasi yang terintegrasi, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah itu menurut (Pancawati Hardiningsih, 2020) komitmen pimpinan berpengaruh besar terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran, terutama dalam konteks pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa komitmen organisasi dari aparat pemerintah desa sangat penting untuk mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pimpinan yang memiliki komitmen tinggi mendorong penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Selain itu, komitmen pimpinan juga berkontribusi pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi aparat dalam mengelola anggaran. Dengan demikian, komitmen pimpinan tidak hanya memperkuat struktur pengelolaan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga akuntabilitas, dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Diakhir (Cris Kuntadi, 2022) komitmen pimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran pada Kementerian/Lembaga. Dukungan dan komitmen pimpinan yang tinggi terhadap target kinerja anggaran dapat meningkatkan perhatian terhadap proses pencapaian kinerja, serta mengatasi potensi permasalahan yang mungkin timbul. Pimpinan yang berkomitmen cenderung memberikan dukungan kepada pegawai melalui pengembangan potensi, pengawasan, dan koordinasi yang efektif, sehingga dapat mengoptimalkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran. Penelitian menunjukkan bahwa komitmen manajemen sebagai bentuk dukungan organisasi berhubungan positif dengan penggunaan indikator kinerja yang lebih tinggi. Dengan demikian, komitmen pimpinan tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran tetapi juga memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di peroleh kerangka berpikir artikel seperti di bawah ini.

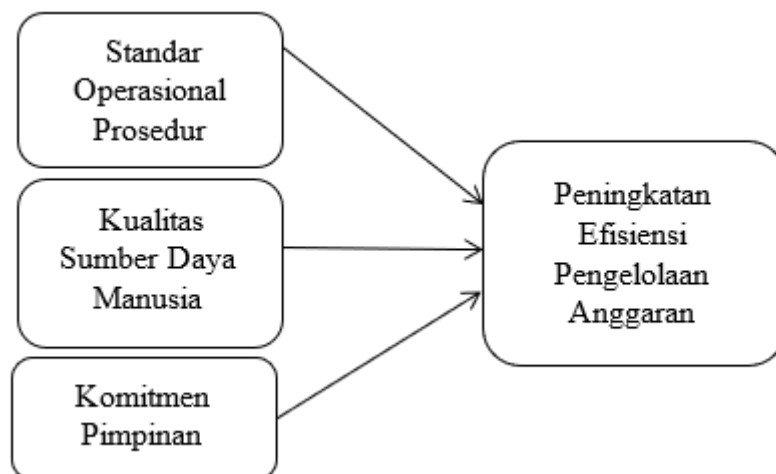


Figure 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, Standar Operasional Prosedur, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Komitmen Pimpinan berpengaruh terhadap Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran. Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran, masih banyak variable lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- a) Realisasi Anggaran (Fina Arpah, 2016), (Durratun Nashihah, 2023);
- b) Sistem Informasi Keuangan (Erwinton Putra Antonius Tarigan, 2013), (Fina Arpah, 2016);
- c) Kepatuhan terhadap Regulasi (Erwinton Putra Antonius Tarigan, 2013), (Fina Arpah, 2016) (Cris Kuntadi, 2022);
- d) Inovasi dalam Pengelolaan Anggaran (Cris Kuntadi, 2022).

Conclusion

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Standar Operasional Prosedur berpengaruh terhadap Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran.
3. Komitmen Pimpinan berpengaruh terhadap Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran.

Acknowledgement

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran selain dari Standar Operasional Prosedur, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan pada semua tipe dan level organisasi atau instansi pemerintahan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran selain yang variabel yang di teliti pada artikel ini. Faktor lain tersebut seperti Realisasi Anggaran, Sistem Informasi Keuangan, Kepatuhan terhadap Regulasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Anggaran.

References

- Fina Arpah, H. A. (2016). Strategi Peningkatan Akuntabilitas Keuangan di Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Vol.8 No.1 (2016) <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpd/article/view/24661>
- Durratun Nashihah, R., U., B., & Lailla (2023). Strategi Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan*, Vol.6 No.1 (2023). <https://jurnalpangripta3.malangkota.go.id/PANGRIPTA/article/view/16>
- Muhammad Syauqi, H.Y. (2017). Strategi Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor dalam Pengelolaan APBD. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Vol.9 No.1 (2016). <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpd/article/view/27540>
- Erwinton Putra Antonius Tarigan, L., (2013). Standar Akuntansi Pemerintah dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 17, No. 1 (2013). <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6847>
- Pancawati Hardiningsih, U., G., C., (2020) Does Competency, Commitment, and Internal Control Influence Accountability?. *Jurnal of Asian Finance Economics and Business* 7(4):223-233. https://www.researchgate.net/publication/341052388_Does_Competency_Commitment_and_Internal_Control_Influence_Accountability
- Cris Kuntadi, G., (2022). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian/Lembaga : Sistem Pengukuran Kinerja, Dukungan Organisasi, dan Faktor Individual. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, Vol. 4 No. 2 (2022).

<https://dinastirev.org/JIMT/article/view/1220>

Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi. Yogyakarta : Deepublish

www.bpk.go.id

www.kemenkeu.go.id

bappenas.go.id

www.kpk.go.id

internationalbudget.org

<https://www.transparency.org>